

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan entitas yang memiliki struktur keuangan kompleks dan kebutuhan pendanaan jangka panjang yang tinggi. Karakteristik industri yang padat modal dan berbasis aset tetap menjadikan strategi pengelolaan pajak sebagai aspek penting dalam perencanaan keuangan. Dalam praktiknya, perusahaan berpotensi memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Konflik keagenan dalam perusahaan publik tidak hanya terjadi antara hubungan manajemen dan pemegang saham, namun dapat diperkuat oleh struktur pembiayaan dan kepemilikan perusahaan. Ketika manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih, terdapat kecenderungan untuk menekan beban pajak sehingga menimbulkan potensi perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, karakteristik keuangan seperti *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejauh mana perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Tata kelola perusahaan menjadi faktor kunci dalam membatasi tindakan manajemen yang menyimpang. Fungsi komisaris independen ini

sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara objektif. Peran komisaris independen menjadi penting dalam memoderasi pengaruh variabel keuangan terhadap keputusan perpajakan, terutama dalam mengontrol tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini berfokus pengaruh *leverage*, intensitas modal dan ukuran perusahaan serta peran moderasi komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* periode 2021-2023. Sektor ini memiliki struktur aset dan kewajiban yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui penyusutan aset tetap dan biaya utang.

Berikut adalah tabel pemilihan sampel perusahaan properti & *real estate*:

Tabel 2.2 Kriteria Penelitian

KRITERIA	JUMLAH
Seluruh perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode tahun 2023.	93
Perusahaan yang tidak aktif penuh selama periode 2021-2023.	-17
Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit secara lengkap selama 2021–2023.	-8
Perusahaan yang tidak menyediakan informasi lengkap mengenai total liabilitas (<i>leverage</i>), total aset tetap (intensitas modal), total aset (ukuran perusahaan), dan beban pajak serta laba sebelum pajak.	-4
Perusahaan yang tidak menyediakan informasi lengkap mengenai komisaris independen.	-4
Perusahaan yang mengalami kerugian pada salah satu tahun selama 2021–2023.	-32
Sampel sesuai kriteria.	28
Total sampel penelitian 3 Tahun	84

Berikut daftar perusahaan yang memenuhi kriteria *purposive sampling* di atas:

Tabel 2.3 Sampel Penelitian

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk
2	ASRI	Alam Sutera <i>Realty</i> Tbk
3	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
4	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
5	CSIS	Cahaya sakti Investindo Sukses Tbk
6	CTRA	Ciputra <i>Development</i> Tbk
7	DILD	Intiland <i>Development</i> Tbk
8	DMAS	Puradelta Lestari Tbk
9	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
10	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk
11	HOMI	<i>Grand House</i> Mulia Tbk
12	INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk
13	IPAC	Era Graharealty Tbk
14	JRPT	Jaya <i>Real Property</i> Tbk
15	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
16	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
17	LPLI	<i>Star Pacific</i> Tbk
18	MKPI	Metropolin Kentjana Tbk

19	MMLP	Mega Manunggal <i>Property</i> Tbk
20	MTLA	Metropolitan <i>Land</i> Tbk
21	PLIN	Plaza Indonesia <i>Realty</i> Tbk
22	POLI	Pollux <i>Hotels Group</i> Tbk
23	PWON	Pakuwon Jati Tbk
24	REAL	Repower Asia Indonesia Tbk
25	ROCK	Rockfields Properti Indonesia Tbk
26	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
27	SMRA	Summarecon Agung Tbk
28	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk

4.1.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak secara umum berarti strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal dan illegal. Agresivitas pajak tercermin dari rendahnya kontribusi beban pajak terhadap laba sebelum pajak, yang dihitung melalui rasio *Effective Tax Rate* (ETR).

4.1.2 Leverage

Merujuk pada agresivitas pajak, perusahaan berpotensi melakukan *leverage* yang mengacu pada tingkat ketergantungan terhadap utang dalam membiayai asetnya. Dalam hal ini, *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan sumber dana eksternal. Pada konteks perpajakan dapat memengaruhi beban pajak melalui pengurangan

beban bunga pinjaman, Sehingga *leverage* menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.1.3 Intensitas Modal

Intensitas modal mengukur proporsi penggunaan aset tetap dalam total aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal, berarti perusahaan memiliki lebih banyak investasi pada aset tetap yang memiliki masa manfaat seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Umumnya aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan, sehingga mendukung perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak secara legal.

4.1.4 Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki pada perusahaan, dan dinyatakan dalam *logaritma natural* ($\ln$) total aset. Perusahaan yang besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih kuat dan akses terhadap strategi perpajakan. Namun, perusahaan besar mendapatkan pengawasan khusus yang lebih ketat dari otoritas perpajakan maupun ojk, sehingga hubungan antara ukuran dan agresivitas pajak bisa bersifat dua arah. Oleh karena itu, penelitian ini mengamati ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang relevan terhadap agresivitas pajak.

4.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak eksternal. Dalam penelitian ini, komisaris

independen bertindak sebagai variabel moderasi yang diuji kemampuannya dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Proporsi komisaris independen dihitung dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan perusahaan serta mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2.4 Hasil Statistik Dekskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEVERAGE	84	.0020	.6330	.313893	.1739862
INTENSITAS MODAL	84	.0000	.6430	.081940	.1219780
UKURAN PERUSAHAAN	84	242.180	318.330	29.022.369	17.357.818
AGRESIVITAS PAJAK	84	.0000	30.160	.204488	.3873323
KOMISARIS INDEPENDEN	84	.2500	.6670	.426083	.1043345

Berdasarkan hasil uji ini, diketahui *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,0020 dan maksimum 0,6330, dengan rata-rata sebesar 0,3139 serta standar deviasi 0,1739. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan utang perusahaan terhadap total aset tergolong relatif rendah, dengan penyebaran nilai yang tidak terlalu lebar antar perusahaan. Intensitas Modal menunjukkan nilai minimum 0,0000 dan maksimum 0,6430, dengan

rata-rata sebesar 0,0819 dan standar deviasi 0,1219. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki proporsi aset tetap yang relatif rendah terhadap total aset, namun terdapat beberapa perusahaan dengan intensitas modal yang cukup tinggi. Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 242.180 dan maksimum 318.330, dengan rata-rata sebesar 29.022.369 dan standar deviasi 17.357.818. Nilai ini mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam total aset perusahaan yang menjadi sampel penelitian, dari perusahaan berskala sedang hingga besar. Agresivitas Pajak tercatat dengan nilai minimum 0,0000 dan maksimum 30,1600, sementara nilai rata-rata sebesar 0,2045 dan standar deviasi 0,3873. Ini menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan cenderung rendah, namun terdapat beberapa perusahaan yang menunjukkan tingkat agresivitas yang tinggi dalam strategi perpajakannya. Komisaris Independen memiliki proporsi minimum sebesar 0,2500 dan maksimum 0,6670, dengan rata-rata sebesar 0,4261 dan standar deviasi 0,1043. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi praktik *good corporate governance* dengan menyertakan proporsi komisaris independen yang cukup seimbang, meskipun masih terdapat variasi antar perusahaan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 2.5 Hasil Uji Asumsi Klasik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1,44366927
Most Extreme Differences	Absolute	0,06
	Positive	0,06
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,06
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas terhadap residual model regresi menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual model terdistribusi normal sebagai bagian dari asumsi klasik regresi linear. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal secara statistik.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LEVERAGE	0,615	1,625
INTENSITAS MODAL	0,549	1,82
UKURAN PERUSAHAAN	0,957	1,045
KOMISARIS INDEPENDEN	0,763	1,311
LEVERAGE_KOMISARIS INDEPENDEN	0,492	2,033
INTENSITAS MODAL_KOMISARIS INDEPENDEN	0,541	1,85
UKURAN PERUSAHAAN_KOMISARIS INDEPENDEN	0,733	1,364

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gejala multikolinearitas atau tidak, dengan mengacu pada nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang ditampilkan didalam tabel, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model menunjukkan nilai *Tolerance* di atas ambang batas minimum 0,10, dengan kisaran antara 0,492 hingga 0,957, yang menandakan bahwa masing-masing

variabel independen masih memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi dan tidak dijelaskan secara berlebihan oleh variabel lainnya. Sementara itu, nilai VIF seluruh variabel juga berada di bawah batas maksimum 10, sebagian besar berada di bawah angka 2. Karena semua nilai-nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2.7 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,938	1,795		2,193	0,031
LEVERAGE	-0,122	0,081	-0,199	-1,515	0,134
INTENSITAS MODAL	-0,023	0,061	-0,053	-0,384	0,702
UKURAN PERUSAHAAN	-4,23E-11	0	-0,035	-0,329	0,743
KOMISARIS INDEPENDEN	0,123	0,107	0,135	1,144	0,256
LEVERAGE_KOMISARIS INDEPENDEN	-0,131	0,134	-0,144	-0,979	0,331
INTENSITAS MODAL_KOMISARIS INDEPENDEN	-0,232	0,127	-0,255	-1,821	0,073
UKURAN PERUSAHAAN_KOMISARIS INDEPENDEN	-0,189	0,109	-0,207	-1,725	0,089

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, diperoleh bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai

signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik regresi terkait kesamaan *varians residual* telah terpenuhi.

4.3.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 2.8 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandarized Residual
Test Value ^a	0,87
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	42
Total Cases	84
Number of Runs	37
Z	-1,317
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,188

a. Median

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Runs Test* terhadap *residual* model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,188. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dijelaskan residual menyebar secara acak, sehingga tidak terjadi autokorelasi dalam model.

Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik mengenai independensi *residual*.

4.3 Uji Analisis Regresi Moderasi

Tabel 2.9 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
	B	Sig	B	Sig	B	Sig
(Constant)	5,377	0,064	6,369	0,029	11,215	0,001
LEVERAGE	0,031	0,796	-0,003	0,979	-0,169	0,239
INTENSITAS MODAL	-0,029	0,741	-0,054	0,527	-0,158	0,144
UKURAN PERUSAHAAN	-4,73E-10	0,052	-4,38E-10	0,067	-4,16E-10	0,071
KOMISARIS INDEPENDEN			-0,358	0,045	-0,196	0,304
LEVERAGE_KOMISARIS INDEPENDEN					0,635	0,009
INTENSITAS MODAL_KOMISARIS INDEPENDEN					0,425	0,063
UKURAN PERUSAHAAN_KOMISARIS INDEPENDEN					0,223	0,253
Adjusted R Square	0,053		0,1		0,204	
Sig. F (Anova)	1,479		2,186		2,783	

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian analisis regresi moderasi didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

Model 1 (Regresi tanpa moderasi):

$$AP = 5,377 + 0,031 \cdot LEVERAGE - 0,029 \cdot INTENSITAS \text{ MODAL} - 4,727E-10 \cdot UKURAN \text{ PERUSAHAAN}$$

Model pertama menuji tiga variabel independen utama, yaitu *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan untuk melihat pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak. Diketahui nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,796, intensitas modal sebesar 0,741, dan ukuran perusahaan sebesar 0,052. Mengindikasikan

ukuran perusahaan yang menunjukkan signifikansi pada tingkat 10% (*marginally significant*), sedangkan dua variabel lainnya tidak signifikan pada level 5% maupun 10%.

Model 2 (Variabel moderasi):

AP=6,369-0,003-0,054-4,382E-10-0,358

Pada model ini, variabel komisaris independen ditambahkan sebagai prediktor untuk melihat pengaruh langsungnya terhadap agresivitas pajak. Diketahui pada model 2 ukuran perusahaan tetap menunjukkan signifikansi pada level 10% (sig. 0,067) serta komisaris independen menunjukkan signifikansi pada level 5% (sig. 0,045). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa interaksi, komisaris independen memiliki pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak, meskipun efeknya belum cukup kuat untuk menurunkan pengaruh ukuran perusahaan secara signifikan.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara langsung dapat menekan kecenderungan agresivitas pajak, tetapi pengaruh ini belum cukup kuat untuk mengubah pengaruh variabel lainnya.

Model 3 (Uji Regresi Moderasi dengan Interaksi):

AP=11,215-0,169-0,158-4,160E-10-0,196+0,635+0,425+0,223

Model ketiga merupakan model utama dalam uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), yang memasukkan interaksi antara masing-masing variabel independen dengan komisaris independen (sebagai moderator). Diketahui Interaksi *leverage* × komisaris independen signifikan pada 5% (sig. 0,009), Interaksi intensitas modal × komisaris independen signifikan pada level 10% (sig. 0,063),

serta interaksi ukuran perusahaan $\times$ komisaris independen tidak signifikan (sig. 0,253). Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak, tetapi tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji F

Dalam Penelitian ini Uji F bertujuan untuk menilai kelayakan keseluruhan model regresi, yaitu apakah variabel-variabel independen yang digunakan maupun moderasi dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini agresivitas pajak

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) yang terdapat pada tabel ANOVA dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0.05. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria berikut:

- Jika nilai Sig. < 0.05, maka model regresi dianggap layak digunakan karena variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai Sig. > 0.05, maka model tidak layak digunakan karena tidak ada pengaruh simultan yang signifikan.

Model 1 (Variabel independen tanpa moderasi):

Pada model pertama, analisis dilakukan terhadap tiga variabel independen, yaitu *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tanpa

memasukkan variabel moderasi. Hasil uji ini menghasilkan nilai signifikansi F sebesar $1,479 > 0,05$. Artinya, ketiga variabel tersebut secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Model 2 (Variabel moderasi):

Model ini menambahkan variabel komisaris independen sebagai prediktor langsung dalam model. Hasil uji ini menghasilkan nilai signifikansi F sebesar $2,186 > 0,05$, sehingga model ini juga belum signifikan secara simultan.

Model 3 (Uji Moderasi dengan Interaksi):

Model 3 merupakan model interaksi moderasi, yaitu dengan memasukkan seluruh interaksi antara masing-masing variabel independen dan komisaris independen. Hasil uji F ini menunjukkan signifikansi sebesar 0,012 ($F \text{ hitung} = 2,783$) yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model 3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Serta, nilai *Adjusted R Square* naik secara substansial menjadi 0,204, artinya bahwa model yang mencakup interaksi moderasi menunjukkan kemampuan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua model yang diuji sebelumnya.

4.4.2 Uji T

Model 1 (Variabel independen tanpa moderasi):

Pada Model 1, pengujian dilakukan terhadap tiga variabel independen: *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan, untuk melihat pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t

menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik, meskipun variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi mendekati ambang batas 0,05 (sig. 0,052). Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, *leverage* (sig. 0,796) dan intensitas modal (sig. 0,741) tidak memiliki pengaruh langsung terhadap agresivitas pajak, dan belum cukup bukti bahwa ukuran perusahaan juga memengaruhi agresivitas pajak dalam model ini. Nilai koefisien (B) untuk ukuran perusahaan yang sangat kecil dan bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, cenderung menurunkan agresivitas pajak, namun pengaruhnya belum signifikan.

Model 2 (Variabel moderasi):

Pada Model 2, variabel moderasi yaitu komisaris independen dihitung ke dalam model untuk menguji pengaruh langsungnya terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak (sig. 0,045) dengan arah koefisien negatif (-0,358), yang berarti keberadaan komisaris independen cenderung menekan tingkat agresivitas pajak. Meskipun demikian, *leverage* (sig. 0,979) dan intensitas modal (sig. 0,527) masih belum menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, ukuran perusahaan (sig. 0,067) masih berada di dekat ambang signifikansi, tetapi belum cukup untuk disimpulkan berpengaruh. Secara umum, penambahan komisaris independen sebagai prediktor langsung memberikan peningkatan terhadap penjelasan model namun belum mampu mengubah status signifikansi

variabel lainnya.

Model 3 (Uji Moderasi dengan Interaksi):

Model 3 merupakan model utama dalam uji regresi moderasi, di mana selain variabel independen dan moderasi utama (komisaris independen), dimasukkan pula tiga variabel interaksi:

- *Leverage* x Komisaris Independen
- Intensitas Modal x Komisaris Independen
- Ukuran Perusahaan x Komisaris Independen

Hasil uji t menunjukkan bahwa interaksi *leverage* x komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (sig. 0,009; $B = 0,635$). Artinya, komisaris independen mampu memoderasi secara positif hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak, semakin kuat fungsi pengawasan oleh komisaris independen, semakin tinggi pengaruh *leverage* terhadap peningkatan agresivitas pajak.

Dua variabel interaksi lainnya, intensitas modal x komisaris independen (sig. 0,063) dan ukuran perusahaan x komisaris independen (sig. 0,253) tidak berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak cukup efektif dalam memoderasi hubungan antara intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, variabel utama (tanpa interaksi) juga tetap tidak signifikan secara parsial dalam model ini, menunjukkan bahwa efek dominan hanya terlihat pada hubungan *leverage* yang dimoderasi.

4.4.3 Uji *R Square*

Berdasarkan hasil uji *R Square* dapat dijelaskan bahwa:

- Model 1: Menghitung tiga variabel independen: *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan. Diketahui, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,053 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 5,3% variasi dalam agresivitas pajak, sedangkan 94,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
- Model 2: menambahkan pengujian dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi yang diuji secara langsung, bahwa nilai *Adjusted R Square* meningkat menjadi 0,100, artinya model ini mampu menjelaskan 10% variasi agresivitas pajak. Menjadikan adanya peningkatan perbaikan dalam kemampuan model untuk memprediksi, meskipun komisaris independen belum memberikan pengaruh yang signifikan secara langsung.
- Model 3: Komisaris independen diuji sebagai variabel moderasi melalui interaksi dengan ketiga variabel independen. Hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,204, artinya bahwa kombinasi seluruh variabel dan interaksinya dapat menjelaskan 20,4% variasi dalam agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa adanya moderasi dalam model, dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap pemahaman perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Peningkatan *Adjusted R Square* dari Model 1 ke Model 3 sebesar 15,1% menunjukkan bahwa, fungsi proporsional komisaris independen

sebagai moderator memberikan tambahan penjelasan terhadap variasi agresivitas pajak, sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola dapat menekan perilaku oportunistik manajemen.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3.1 Pembahasan Hasil Penelitian

HIPOTESIS	PREDIKSI	KOEFISIEN (B)	SIGNIFIKA NSI (Sig.)	KESIMPULAN
Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	+	(-)0,169	0,239	Ditolak
Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak	+	(-)0,158	0,144	Ditolak
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	+	(-)0,00416	0,071	Ditolak
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak	+	(-)0,196	0,304	Ditolak
Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	+	(+) 0,635	0,009	Diterima
Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak	+	(+) 0,425	0,063	Ditolak
Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	+	(+) 0,223	0,253	Ditolak

4.5.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel sebelumnya, nilai rata-rata *leverage* pada perusahaan sampel adalah 0,3138, yang menunjukkan bahwa struktur permodalan operasional perusahaan sebagian besar didanai oleh utang dalam porsi yang sedang. Sementara itu, nilai rata-rata agresivitas pajak adalah 0,2044, yang mengindikasikan

tingkat penghindaran pajak relatif rendah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, meskipun secara teoritis *leverage* diasumsikan mendorong agresivitas pajak melalui mekanisme pengurangan pajak (*tax shield*), namun dengan hasil empiris menunjukkan bahwa *leverage* bukanlah faktor dominan dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak dalam sampel perusahaan yang diuji. Perusahaan cenderung tidak memanfaatkan utang sebagai instrumen utama dalam strategi penghindaran pajak, melainkan lebih mengandalkan sumber permodalan internal untuk menjaga stabilitas keuangan.

Secara teoritis, *leverage* berhubungan dengan agresivitas pajak, Menurut teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) seringkali menimbulkan konflik kepentingan, dalam konteks ini manajer terdorong menggunakan utang untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak, sehingga sejalan dengan kepentingan pemilik (*principal*). Namun, apabila *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan, perusahaan digambarkan sudah mencapai struktur modal optimal, atau karena adanya pengawasan regulator yang ketat sehingga perusahaan tidak memiliki keleluasaan penuh untuk memanfaatkan utang sebagai instrumen dalam strategi pengurangan beban pajak. Selain itu, peran pengawasan internal maupun eksternal seperti auditor dan dewan komisaris juga dapat membatasi *leverage* yang berlebihan untuk tujuan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Fahrani et al.,2018; Purwantoro

et al., 2024; Bernhard & Veny., 2024) yang menyatakan menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan *leverage* yang besar dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak maupun aktivitas penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena tingkat utang dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi aspek yang selalu diperhatikan oleh kreditur. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar risiko gagal bayar yang terdapat pada perusahaan peminjam. Risiko tersebut pada akhirnya mendorong pihak kreditur untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sekaligus menekan perusahaan agar lebih fokus pada pemenuhan kewajiban finansial dibandingkan dengan melakukan strategi pajak yang bersifat agresif.

4.5.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel sebelumnya, menunjukkan nilai rata-rata intensitas modal perusahaan adalah 0,0819, yang menunjukkan proporsi aset tetap terhadap total aset relatif rendah. Dengan rata-rata agresivitas pajak sebesar 0,2044, hasil ini mengindikasikan tingkat yang rendah. Meskipun prediksi awal adalah positif, hal ini berarti secara empiris, penggunaan aset tetap yang tinggi yang diukur melalui intensitas modal tidak mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Artinya, besar kecilnya investasi pada aset tetap seperti bangunan, peralatan dan mesin tidak menjadikan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui penyusutan.

Secara teoritis, intensitas modal berkaitan dengan agresivitas pajak. Dalam konteks teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976), manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan beban penyusutan sebagai alat perencanaan pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka kemungkinan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya menggunakan aset tetap mereka secara strategis untuk tujuan perpajakan. Serta dengan intensitas modal rendah, ruang bagi manajer untuk memanfaatkan strategi ini juga rendah, sehingga konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam hal ini relatif minim.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Tanjaya et al. (2023), yang menjelaskan intensitas modal terhadap agresivitas tidak berpengaruh signifikan. Dalam temuan Irmu et al. (2022) yaitu, terdapat peraturan di Indonesia yang melegalkan wajib pajak untuk menyusutkan semua aset tetap yang dimiliki perusahaan berdasarkan kelompok aset, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Akan tetapi, dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang dimana merupakan sumber utama aset tetap, maka aset-aset yang dimiliki tidak dapat disusutkan sehingga tidak menimbulkan beban penyusutan.

4.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan data pada tabel hasil uji statistik deskriptif, nilai rata-rata ukuran perusahaan yang diukur dengan $\ln(\text{Logaritma Natural})$ adalah

29.022,369, menunjukkan bahwa sebagian besar sampel penelitian terdiri dari perusahaan berskala besar. Dengan agresivitas pajak rata-rata 0,2044, hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan publik, tekanan regulator, dan kebutuhan menjaga reputasi membuat perusahaan besar lebih berhati-hati dalam strategi penghindaran pajak. Artinya, dalam konteks sampel yang digunakan, perusahaan-perusahaan properti dan *real estate* yaitu ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak memengaruhi perilaku agresivitas pajaknya. Sehingga, perusahaan besar maupun kecil memiliki kemungkinan yang sama dalam merespons kewajiban perpajakan.

Secara teoritis, perusahaan besar diasumsikan memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Dalam teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan besar juga menghadapi tekanan dari pemilik modal untuk memaksimalkan laba bersih, yang sering kali dilakukan melalui strategi penghindaran pajak. Namun, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik dan pemerintah, sehingga menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi, termasuk tindakan agresif dalam perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan berhati-hati dalam pengelolaan pajak.

Temuan ini didukung oleh peneliti sebelumnya oleh (Junensie et al., 2020 ; Saprudin et al., 2024; Bernhard & Veny., 2024) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak. Kewajiban membayar pajak tidak dibedakan berdasarkan skala perusahaan. Perusahaan dengan skala besar maupun kecil tetap memiliki kewajiban hukum dan fiskal yang sama dalam memenuhi beban pajaknya sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

4.5.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan data pada tabel hasil uji statistik deskriptif, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4261 atau 42,61% dari total anggota dewan. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari anggota dewan komisaris merupakan pihak independen, yang berarti proporsi ini cukup tinggi dibandingkan ketentuan minimum OJK sebesar 30%. Rata-rata agresivitas pajak perusahaan dalam sampel sebesar 0,2044, yang mengindikasikan tingkat agresivitas pajak relatif rendah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa proporsi komisaris independen yang tinggi dapat menjadi faktor pengendali dalam menekan perilaku pajak agresif.

Secara teoritis, menurut teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976), komisaris independen berperan penting dalam mengawasi tindakan manajerial agar searah dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Peran komisaris independen ini diharapkan mampu menekan perilaku oportunistik manajemen, seperti melakukan agresivitas pajak. Namun, apabila peran komisaris independen tidak berjalan efektif terhadap pengawasan yang kuat pada aspek keuangan atau perpajakan, maka fungsi pengawasan tidak

berdampak signifikan terhadap perilaku manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Junensie et al., 2020 ; Afrina et al.,2022) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga tidak memberikan pengawasan yang optimal kepada manajemen. Oleh karena itu, masih terjadi agresivitas pajak pada perusahaan. Menurut Saprudin et al. (2024) penyebab bisa saja terjadi, karena beberapa komisaris independen tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau keuangan, sehingga kurang memahami secara teknis strategi dan melakukan tindakan agresif yang dilakukan manajemen terkait pengelolaan pajak.

4.5.5 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan

***Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan data pada tabel hasil uji statistik deskriptif, diperoleh rata-rata *leverage* dalam penelitian ini adalah 0,3138, menunjukkan tingkat penggunaan utang yang moderat. Dengan proporsi komisaris independen sebesar 0,4261, pengawasan terhadap pemanfaatan utang sebagai strategi penghindaran pajak menjadi lebih efektif. Rata-rata agresivitas pajak yang rendah sebesar 0,2044 mengindikasikan bahwa *leverage* tidak digunakan secara berlebihan untuk menekan beban pajak dan keberadaan komisaris independen dapat membatasi ruang manajer untuk memanfaatkan *leverage* sebagai alat agresivitas pajak.

Secara teoritis, dalam konteks teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976), komisaris independen berperan sebagai pengawas

keputusan manajerial agar tetap searah dengan kepentingan pemegang saham. Dalam temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan komisaris independen berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan dapat mencegah perusahaan menggunakan struktur pembiayaan utang secara berlebihan sebagai sarana untuk mengecilkan beban pajak melalui biaya bunga. Dengan demikian, agresivitas pajak perusahaan berpotensi menurun karena keputusan manajemen lebih diarahkan sesuai prinsip dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil ini sejalan secara signifikan dalam temuan Muliawati dan Karyada (2020) yang memiliki signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, walaupun memiliki arah yang berbeda, namun secara signifikansi komisaris independen dapat memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitiannya besarnya komisaris independen didalam perusahaan memengaruhi kecenderungan manajemen dalam memanfaatkan utang sebagai instrumen untuk melakukan agresivitas pajak.

4.5.6 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan

Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan data pada tabel hasil uji statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai rata-rata intensitas modal sebesar 0,0819 menunjukkan bahwa proporsi aset tetap terhadap total aset relatif rendah. Hal ini berarti peluang memanfaatkan depresiasi dan amortisasi untuk mengurangi beban pajak juga terbatas. Dengan keberadaan komisaris independen rata-rata 0,4261, pengawasan terhadap penggunaan aset tetap untuk tujuan agresivitas pajak

semakin tinggi. Nilai rata-rata agresivitas pajak yang rendah 0,2044, mengindikasikan bahwa komisaris independen memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap agresivitas pajak, meskipun dalam uji menghasilkan signifikansi $> 0,5$.

Secara teoritis, peran komisaris independen dalam teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976), berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Dalam konteks intensitas modal, perusahaan dengan aset tetap tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menyusun strategi depresiasi yang akan menekan laba kena pajak. Namun, apabila komisaris independen tidak memiliki kompetensi atau keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan perpajakan, maka peran moderasi tidak berjalan optimal.

Hasil ini sejalan dengan Tanjaya et al. (2023) yang menjelaskan hasil penelitiannya bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Hal ini, karena kurangnya kualitas pengawasan dan mutu kerja komisaris independen.

4.5.7 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan

Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan data pada tabel hasil uji statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai rata-rata 29.022,369, yang menunjukkan mayoritas perusahaan adalah perusahaan besar. Perusahaan besar umumnya memiliki pengawasan publik yang ketat dan akses sumber daya yang besar, termasuk dalam manajemen pajak. Dengan proporsi komisaris independen yang tinggi

sebesar 0,4261, kecenderungan perusahaan besar untuk melakukan agresivitas pajak dapat dikontrol oleh komisaris independen, dengan nilai rata-rata agresivitas pajak yang rendah (0,2044). Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Meskipun dalam hasil uji mendapatkan signifikan $> 0,5$.

Dari sisi teori, dalam teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan yang berukuran besar memiliki struktur organisasi yang kompleks dan lebih banyak sumber daya, sehingga dapat meningkatkan pengawasan internal, seperti komisaris independen. Besarnya ukuran menggambarkan lebih banyak peluang untuk menyusun strategi perpajakan agresif secara tersembunyi. Komisaris independen sebagai pengawas eksternal diharapkan dapat menekan kecenderungan ini. Akan tetapi, apabila efektivitas komisaris independen memiliki peran yang lemah, maka tidak dapat berperan signifikan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Meskipun belum terdapat penelitian terdahulu yang secara langsung menguji peran komisaris independen dalam memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, beberapa studi menunjukkan bahwa peran komisaris independen sering kali tidak efektif dalam memoderasi hubungan variabel-variabel lain terhadap agresivitas pajak, seperti *leverage* atau intensitas modal (Tanjaya & Jati, 2023; Nuryatun & Mulyani, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum fungsi pengawasan komisaris

independen masih belum optimal, khususnya dalam konteks pengendalian strategi perpajakan perusahaan.